

Membangun Organisasi Birokrasi yang Katalis (Telaah Kritis Model Birokrasi Indonesia)

Murtir Jeddawi

STIA Prima Sengkang, Sul-Sel

E-mail: murtir_bappeda@yahoo.com

Abstrak

Bergulirnya reformasi dan lahirnya UU Tentang Pemerintah Daerah (UU No.32 dan 33 Tahun 2004) sistem organisasi birokrasi yang katalitik telah mulai dibangun. Intinya birokrasi model ini tidak lagi hanya bergantung pada pemerintahan pusat melainkan telah didesentralisasikan ke daerah. Dengan model ini maka birokrasi sebenarnya dapat lebih responsif, antisipatif dan memiliki pembagian kerja yang jauh lebih jelas, efektif dan efisien. Hanya saja di sini diperlukan kreativitas pengembangan dan pendalaman dari para ahli dan para pelaku administrasi di Indonesia.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam kaitan ini adalah mengacu pula kepada model *good governance* dan *clean government* yang memang sangat dekat dengan implementasi konsep katalitik.

Keywords: Reformasi, Birokrasi, Pemerintah Daerah, Katalis.

Lengsernya Presiden Soeharto Mei 1998 menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru sekaligus memunculkan era reformasi yang mengusung segala konsep “berbeda” dibanding sebelumnya. Pada era reformasi ini tuntutan masyarakat terutama agar perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih pasti menuju kesejahteraan nampak mengeras.

Seiring dengan tuntutan tersebut seluruh *stakeholder* bangsa telah pula termotivasi untuk segera melakukan pembenahan di berbagai sektor. Bahkan jika dilihat setelah perjalanan 10 tahun reformasi pembenahan yang sifatnya terus menerus (intensif) dan menyeluruh telah dilakukan oleh sejumlah instansi menyesuaikan dengan kehendak masyarakat (publik).

Hal yang cukup banyak mendapat sorotan di antaranya adalah birokrasi. Masyarakat memandang birokrasi dan institusi pemerintah yang selama ini ada telah menjadi salah

satu faktor penyebab terhadap terjadinya krisis yang melanda Indonesia. Anggapan dan penilaian masyarakat ini didukung oleh kenyataan yang secara faktual justru penyebab terbesar dari semua ini; yaitu akibat praktik birokrasi dalam pemerintahan kita yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Besarnya kontribusi birokrasi sebagai salah satu organisasi yang paling dominan dalam pemerintahan, terutama di negara berkembang telah disinyalir oleh Max Weber (1994) dengan menyatakan bahwa organisasi birokrasi dengan segala kelebihan dan kemampuannya telah menjadi satu lembaga yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan urusan negara dan pemerintahan. Bahkan Max Weber mengajukan konsep idealnya bahwa birokrasi dianggapnya sebagai suatu sistem yang paling efektif dan efisien dalam menjalankan sebuah negara, dan tidak mungkin terlibat KKN sebab birokrasi memang dirancang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, spesialisasi, produktivitas, kontrol yang ketat, serta pemerataan pelayanan yang berkeadilan (*equity*) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Sayangnya apa yang diidealkan oleh Weber itu dalam kasus birokrasi di Indonesia telah jauh panggang dari api. Birokrasi di Indonesia telah menunjukkan wajah yang sangat buruk kalau tidak bisa dikatakan telah berperan besar menyumbang terjadinya berbagai kasus KKN di Indonesia (kompas, 23 Juni 2008).

Yang jelas dengan adanya tuntutan demikian besar dari masyarakat agar birokrasi ikut direformasi ditambah lagi dengan pengaruh akibat globalisasi dari negara-negara lain membuat kita tidak memiliki pilihan lain kecuali mereformasi kondisi birokrasi yang ada agar kita dapat terbebas dari keterpurukan ini.

Besarnya kontribusi birokrasi dan dominannya organisasi ini didalam mengatur pemerintahan telah dibenarkan oleh Max Weber (Weber,1994). Dikatakannya di negara-negara berkembang birokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjadi satu lembaga yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan urusan negara dan pemerintahan. Weber mencatat di negara-negara yang mengaplikasikan sistem birokrasi yang efektif, efisien, professional, terspesialisasi, produktivitas, kontrol yang ketat serta pemerataan pelayanan yang berkeadilan (*equity*) bagi seluruh masyarakat telah mendorong banyak kemajuan terhadap pelayanan publik bagi suatu negara. Ia mencontohkan birokrasi seperti di Jepang, China, Amerika adalah contoh-contoh birokrasi yang baik tadi. Tetapi, dikhawatirkan juga oleh Weber, bahwa dengan demikian besar dan dominannya peran birokrasi itu menyebabkan birokrasi terkadang terjebak pada berbagai kasus penyimpangan seperti terjadinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Birokrasi yang tidak siap seperti ini terutama karena tidak didukung oleh SDM yang handal, sistem yang masih lemah serta kuatnya “kekuasaan/politik” pemerintah didalam mengendalikan birokrasi itu sendiri.

Seiring dengan waktu, tuntutan masyarakat yang semakin kuat saat ini ditambah lagi dengan situasi tantangan global yang sudah masuk akibat kebijakan internasionalisasi Negara, mau tidak mau berpengaruh besar terhadap kondisi dalam negeri. Dengan kata lain, seperti disebut Alvin Toffler (1990) dunia saat ini ibarat desa besar dimana yang terjadi di sudut Eropa dapat berdampak langsung ke sudut mana saja termasuk Indonesia. Sebagai contoh konkret kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dunia telah berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Hal semacam ini telah menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk bergerak lebih cepat, antisipatif dan responsif. Mengubah, membangun dan menciptakan birokrasi ideal seperti konsep Weber jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain membutuhkan SDM handal, konsep dan visi yang jelas juga memerlukan etos kerja (S.H. Alatas, 1987:1-15). yang sifatnya terus menerus dan pantang menyerah. Dengan kata lain, harus ada upaya yang secara konsisten pada upaya *reformasi, revitalisasi atau restrukturisasi sektor publik*.

Gagasan akan perlunya efisiensi sektor publik dan profesionalisme aparatur ini jelas didasari oleh pemikiran bahwa pada masa yang akan datang, aparatur negara akan dihadapkan pada suatu kondisi obyektif yang menuntut daya saing (*competitiveness*) serta kecepatan dan keakuratan (*effectiveness*) penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Terlebih lagi jika diingat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi tetap terbatas, sementara tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan umum (*public service*) semakin meningkat.

Jika kondisi semacam ini terus dibiarkan dan berlanjut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi gap atau kesenjangan yang pada gilirannya akan menjauhkan birokrasi dari masyarakat yang harus dilayaninya. Oleh karena itu, reformasi di sektor publik tidak dapat hanya dilakukan secara serentak (sporadis) pada suatu waktu tertentu saja, akan tetapi justru perlu dilakukan secara gradual dan berkelanjutan mengikuti alur perubahan tuntutan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, birokrasi sektor publik__baik di negara maju maupun berkembang__secara konsisten telah melakukan berbagai strategi reorientasi, revitalisasi maupun reformasi dari fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanannya.

Beberapa negara yang telah mencoba melancarkan program reformasi ini antara lain Kanada dengan Public Service Reform 2000 (PS 2000), atau Malaysia dengan Visi 2020.

Berdasarkan uraian tersebut maka bagaimana membangun sebuah organisasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan di luar dirinya adalah sebagai sebuah jawaban dan sekaligus harapan yang harus menjadi tujuan sebuah organisasi birokrasi.

Namun, bagaimana konsep ini dikembangkan dalam sistem birokrasi di Indonesia, jelas merupakan pekerjaan besar baik bagi para ahli maupun bagi para pelaku administrasi negara di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan mencoba menguraikan dan mengkonstruksi pemikiran dalam membangun dan mengubah sebuah birokrasi dengan mengikuti alur tuntutan masyarakat agar menjadi organisasi birokrasi yang adaptif dan efisien.

1. Reinventing Government sebagai Teori Dasar

Dari berbagai kajian dan studi yang pernah dilakukan, muncul sebuah buku yang sangat fenomenal yang telah mewarnai perkembangan ilmu administrasi. Buku ini terbit pada tahun 1990 membahas seluk beluk birokrasi secara detail dan bagaimana mengembalikan citra positif birokrasi yang sudah terkena stigma negatif seperti birokrasi yang berjalan lamban, penuh dengan KKN dan dianggap tidak mampu lagi bangkit menjadi pionir dalam struktur masyarakat modern. Buku tersebut berjudul *Reinventing Government : How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector* karya David Osborne dan Ted Gaebler terbit tahun 1992. Melalui buku tersebut mereka mencoba mengelaborasi berbagai upaya strategi dan pendekatan yang telah dilakukan sektor publik di Amerika Serikat dalam melakukan reformasi, restrukturisasi ataupun

revitalisasi praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, daerah (lokal) maupun badan usaha milik negara dalam beberapa waktu yang silam hingga dewasa ini.

Keduanya menyebut keseluruhan upaya tersebut sebagai tindakan “Penemuan Kembali Praktik Pemerintahan (*Reinventing Government*)”. Osborne dan Gaebler meyakini bahwa proses “penemuan” tersebut dilandasi oleh semangat kewirausahaan yang melekat dalam diri aparatur pemerintah yang mendorong mereka untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dan perubahan yang mendasar dalam praktik dan perubahan mendasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Buku tersebut akhirnya menyimpulkan adanya sepuluh prinsip yang mendasari proses transformasi sektor publik di Amerika Serikat,. Kesepuluh prinsip transformasi birokrasi tersebut merupakan kristalisasi dari berbagai cerita sukses organisasi pemerintahan di Amerika Serikat dalam melakukan berbagai perubahan dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kelembagaan sektor publik.

Kendatipun secara konseptual kedua ahli administrasi ini telah memberikan garis-garis besar mengenai program reformasi sektor publik, namun perlu dipahami juga bahwa aparatur pemerintah di masing-masing negara/daerah memiliki spesifikasi-spesifikasi masing-masing yang secara kontekstual berbeda. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi harus dipahami bukan secara hitam putih, melainkan harus disikapi secara bijaksana. Artinya, tujuan hakiki program reformasi sesungguhnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mewirausahakan birokrasi semata-mata.

Dalam kaitan itulah, maka pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia sektor publik perlu diupayakan secara kontinyu dan sistematis, sehingga akan

mampu melaksanakan program reformasi secara tepat guna dan berhasil guna. Terlebih lagi jika diingat bahwa kondisi lingkungan strategis organisasi pemerintah telah demikian berkembang yang semakin menuntut eksistensi aparatur negara yang transparan, bersih dan berwibawa, handal, bermental/bermoral agama, profesional, efektif dan efisien.

2. Perubahan Dalam Organisasi Birokrasi Sektor Publik

Apa yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gaebler itu sebenarnya lahir dari rasa kegelisahan mereka melihat “bobroknnya” kondisi birokrasi yang ada dan mereka berupaya memberikan “perspektif” berbeda agar birokrasi dapat berubah ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan mereka aparat birokrasi sebenarnya mengerti penyakit yang dialami, namun tidak memiliki cukup konsep dan kekuatan untuk mmengubahnya. Lalu mereka menawarkan konsep baru yang sekiranya cukup dapat diterima untuk diterapkan, dan terpenting dapat mengubah kondisi yang ada agar lebih baik.

Melihat apa yang dilakukan oleh Osborn dan Gaebler ini, bagi orang-orang yang alergi terhadap perubahan tak pelak merupakan tindakan yang sangat berani bahkan ekstrim. Tetapi pilihan itu, tampaknya menjadi pilihan mutlak. Jika diperhatikan, kondisi birokrasi pemerintahan selama ini memang mengesankan ke dalam corak organisasi mekanik (*mechanical paradigm*) yang berasumsi bahwa organisasi adalah *suatu mesin yang bekerja dengan suatu keteraturan dan keajegan tertentu yang menekankan adanya suatu tingkat produktivitas tertentu yang ingin mencapai taraf efisiensi tertentu pula, dan dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan.*

Paradigma mekanik ini pada kenyataannya sudah tidak relevan (*out of date*) dengan tuntutan kebutuhan di lapangan, sehingga diperlukan paradigma baru yaitu organisasi organik (*organism paradigm*). Paradigma ini memandang *organisasi sebagai suatu*

sistem yang menekankan pada unsur manusia sebagai pelaku utama. Dalam model ini, efisiensi dan efektivitas bukan merupakan aspek utama dalam pencapaian tujuan organisasi, sebab produk (*output*) tidak dipandang sebagai hal yang utama. Aspek yang dianggap lebih penting dalam organisasi model organik ini adalah adanya keseimbangan antara faktor manusia dengan faktor lingkungan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik ternyata juga mengalami suatu proses perubahan yang tidak bisa dielakkan. Contoh dalam kasus ini yaitu adanya gerakan reformasi tahun 1998.

Di samping itu, jika dahulu pemerintah selalu menyediakan sarana investasi untuk kelancaran kegiatan ekonomi publik maupun swasta (misal, penyediaan tanah untuk jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya), maka saat ini tidak seorang pun memimpikan hal itu. Dengan dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, Osborne dan Gaebler menawarkan sepuluh prinsip sebagai upaya *reengineering* pemerintahan yaitu:

1. Pemerintahan katalitik (*catalytic government*),
2. Pemerintahan milik rakyat (*community owned government*),
3. Pemerintahan yang kompetitif (*competitive government*),
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi (*mission driven government*),
5. Pemerintahan berorientasi hasil (*result oriented government*),
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan (*customer driven government*)
7. Pemerintahan kewirausahaan (*enterprising government*),
8. Pemerintahan antisipatif (*anticipatory government*),
9. Pemerintahan desentralisasi (*decentralization government*),

10. Pemerintahan yang berorientasi pasar (*market oriented government*).

Menurut Osborne dan Gaebler, perumusan kesepuluh prinsip di atas sangat penting untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, didasari oleh beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah merupakan mekanisme koordinasi dan mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif (*state mechanism*).
2. Bahwa mekanisme masyarakat dan mekanisme pasar (*market mechanism*) tidak akan berfungsi secara efektif tanpa pemerintahan yang efektif pula.
3. Bahwa yang menjadi masalah pokoknya bukan terletak kepada orang atau manusia yang bekerja pada pemerintahan melainkan pada sistem tempat mereka bekerja.
4. Bahwa liberalisme tradisional maupun konservatisme tradisional tidak banyak relevansinya dengan masalah yang dihadapi pemerintah saat ini. Artinya, upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang baru dan upaya swastanisasi birokrasi, bukan merupakan pilihan yang sifatnya “hitam putih” atau keharusan mutlak antara ya dan tidak. Akan tetapi makna yang tersirat dalam berbagai upaya tadi adalah bagaimana menata ulang pemerintah agar menjadi lebih efisien.
5. Bahwa keadilan adalah untuk semua orang. Artinya, dengan menciptakan pemerintah yang kompetitif, keadilan (atributif) masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam hal pelayanan umum justru akan semakin meningkat, bukan sebaliknya.

Motivasi kewirausahaan ke sektor publik yang disuntikkan Osborn dan Gaebler dalam bukunya itu sejatinya mengambil dasar konseptual J.B.Stay (1800), yang menyatakan bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah pemindahan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar. Di sini esensi jiwa entrepreneur harus dioptimalkan dengan ciri-ciri seperti tertuang dalam kalimat mereka sebagai berikut (Winardi:1995):

.....pemerintah wirausaha mendorong *kompetisi* antar pemberi jasa. Mereka memberi wewenang kepada warga dengan mendorong adanya kontrol dari birokrasi ke dalam masyarakat. Mereka mengukur kinerja perwakilannya dengan memusatkan pada hasil, bukan masukan. Mereka digerakkan oleh tujuannya__misi mereka__bukan oleh ketentuan dan peraturan. Mereka mendefinisikan kembali makna klien mereka sebagai *pelanggan* dan menawarkan kepada mereka banyak pilihan. Mereka lebih suka *mencegah* masalah sebelum muncul, ketimbang hanya memberi servis sesudah masalah itu muncul. Mereka mencurahkan energinya untuk *memperoleh* uang, tidak hanya membelanjakannya. Mereka *mendesentralisasikan* wewenang dengan menjalankan manajemen partisipasi. Mereka lebih menyukai mekanisme *pasar* ketimbang mekanisme birokratis. Dan mereka tidak hanya memfokuskan pada pengadaan perusahaan negara, tetapi juga pada *mengkatalisasikan* semua sektor__pemerintah, swasta, dan lembaga sukarela__ke dalam tindakan untuk memecahkan masalah masyarakatnya.

6. Mengendalikan Lebih Baik Daripada Mengayuh

Pemerintahan yang katalitik berarti memberi peran kepada pemerintah untuk menempatkan birokrasi lebih sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan pemberi layanan (*steering rather than rowing*). Secara implisit hal ini mengandung makna bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawabnya kepada swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusannya baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional dan sebagainya. Dalam hal ini, pihak swasta dan masyarakat diajak untuk memikul peran dan

tanggungjawab, yang selama ini terkesan hanya ditanggung oleh pemerintah atau hanya tergantung pada pemerintah.

Dari uraian ini substansi kata pemerintah (*government*) lantas dikembalikan maknanya seperti semula. Seperti diketahui kata “pemerintahan” (*government*) berasal dari kata Yunani yang berarti mengarahkan. Tugas pemerintah berarti mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh sedang pemerintah tidaklah pandai mengayuh.

Dengan menonjolkan fungsi pengarahan daripada pelayanan langsung, diharapkan akan tercipta organisasi birokrasi yang kecil tetapi kuat. Sebagaimana pernah dikatakan Gubernur Lawton Chiles dari Florida, AS, tujuan utama dari pemerintah adalah menjadi katalisator yang membantu masyarakat dalam memperkuat infrastruktur warganya. Dengan cara ini pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk memecahkan setiap masalah sendiri. Pemerintah lebih banyak memfokuskan pada fungsi pembuatan kebijaksanaan dan pengarahan, sedangkan pelaksanaan dan penggerakan lebih banyak dilakukan oleh lembaga bisnis (ekonomi) dan sosial.

Dari alasan di atas pula Osborne dan Gaebler menghendaki agar *tugas pemerintah untuk “mengayuh” dan “mengarahkan” dipisahkan*. Sebab, saat ini lembaga pemerintah membutuhkan fleksibilitas untuk merespon setiap kondisi yang kompleks dan berubah cepat. Hal ini menjadi sulit jika para penentu kebijakan hanya mampu menggunakan satu metode pelayanan yang dihasilkan oleh birokrasi mereka sendiri.

Argumen yang kurang lebih sama dikemukakan Peter Drucker (pakar manajemen), menurutnya organisasi yang berhasil memisahkan manajemen puncak dari operasi, akan memungkinkan manajemen puncak berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan

pengarahan. Sedangkan operasi sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, masing-masing memiliki misi, sasaran dan ruang lingkup dan tindakan serta otonomi. Jika tidak para manajer akan tercacaukan oleh tugas-tugas operasional dan tidak dapat menghasilkan keputusan dasar yang bersifat mengarahkan.

Pemerintahan entrepreneurial senantiasa membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan diri pada suatu misi dan melakukannya dengan baik. Upaya mengarahkan memerlukan orang yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya.

Kekhawatiran untuk memanfaatkan lembaga non pemerintah tentu saja ada, karena bisa jadi cara ini akan mengorbankan banyak pekerjaan pegawai negeri. Namun sesungguhnya, pegawai negeri tidak harus menjadi korban pemerintah entrepreneurial tetapi sebaliknya yakni dapat diuntungkan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kebebasan untuk menggunakan pikiran dan untuk mendapatkan peluang untuk bekerja.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada hakikatnya antara sektor pemerintah dan swasta mempunyai tujuan yang sama tetapi dunianya berbeda. Karena keduanya mempunyai prinsip birokrasi yang berbeda, dimana urusan bisnis semestinya tidak mempunyai kepentingan dengan pemerintah dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur.

Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan katalis, upaya swastanisasi perlu dikembangkan, namun tetap harus diingat bahwa hanya aspek pelayanan saja yang dapat dikontrakkan ke sektor swasta, sedangkan pemerintahan (*government*) tidak. Kita dapat menswastakan fungsi-fungsi pengarah yang terpisah, tetapi tidak keseluruhan proses

kepemerintahan. Swasta dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari pemerintah, begitu pula pemerintah dalam beberapa hal akan lebih baik daripada swasta.

Sektor pemerintah lebih baik dari swasta, misalnya, dalam hal-hal: manajemen kebijakan, regulasi, menjamin kepastian hukum dan keadilan, mencegah diskriminasi, serta menjamin kesinambungan dan stabilitas pelayanan. Sementara swasta biasanya lebih baik dalam menangani tugas-tugas ekonomi, inovasi, mengulangi pengalaman yang berhasil, mengadaptasi perubahan yang pesat, menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dan usang, serta pelaksanaan yang bersifat teknis lainnya.

Dengan demikian, menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat ke tangan swasta, dapat lebih efektif, efisien, adil maupun bertanggungjawab. Tetapi jangan salah sangka terhadap ideologi besar untuk menswastakan pemerintah. Ketika pemerintah menjalin kontrak bisnis dengan swasta, berbagai kalangan sering salah sangka dan berbicara seandainya seolah-olah pemerintah mengalihkan tanggungjawab negara yang fundamental ke swasta.

Penutup

Dari uraian di atas tak pelak lagi sistem organisasi birokrasi yang bersifat katalitik mutlak harus dibangun. Hanya saja tetap memerlukan kajian-kajian bertahap.

Sebenarnya seiring dengan bergulirnya reformasi dan lahirnya UU Tentang Pemerintah Daerah (UU No.32 dan 33 Tahun 2004) sistem organisasi birokrasi yang katalitik telah mulai dibangun. Intinya birokrasi model ini tidak lagi hanya bergantung pada pemerintahan pusat melainkan telah didesentralisasikan ke daerah. Dengan model ini maka birokrasi sebenarnya dapat lebih responsif, antisipatif dan memiliki pembagian

kerja yang jauh lebih jelas, efektif dan efisien. Hanya saja di sini diperlukan kreativitas pengembangan dan pendalaman dari para ahli dan para pelaku administrasi di Indonesia.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam kaitan ini adalah mengacu pula kepada model *good governance* dan *clean government* yang memang sangat dekat dengan implementasi konsep katalitik.

Daftar Pustaka

Adam I. Indrawijaya, 1985, *Perilaku Administrasi*, Sinar Baru, Bandung.

Gordon, Judith R. *Organizational Behaviour: A Diagnostic Approach*, New Jersey: Prentice Hall, 5th Edition, 1996.

John R. Schermerhorn, Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn, 1982, *Managing Organizational Behavior*, John Wiley and son. Ltd, Canada

Miftah Thoha, 1987, *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*, Rajawali Press, Jakarta.

Nafziger, E. Wayne, *The Economics of Developing Countries*, New Jersey: Prentice Hall, 3rd Edition, 1997.

Nokana, I & Tekeuchi, 1995, *The Knowledge-Creating Company*, Harvard Business School Press, Boston.

Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Jakarta.

Inu Kencana Syafii, 1994, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Osborn, David and Gaebler, Ted, 1992, *Reinventing Government (How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector)*, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

S.H. Alatas, *Mitos Pribumi Malas*, 1987, LP 3 ES, Jakarta.

Kompas